

TAMAN NASIONAL KUTAI

30.000 Hektar Terancam

Sangatta, Kompas - Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur terancam kehilangan 30.000 hektar wilayahnya jika usulan perubahan status lahan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur disetujui pemerintah pusat. Permukiman, perkebunan, dan aktivitas lain di taman nasional itu pun akan meluas.

Perubahan sebagian area hutan untuk dijadikan area penggunaan lain (enclave), seluas 30.000 hektar atau seperenam wilayah Taman Nasional Kutai, didesakkan Pemkab Kutai Timur sejak 13 tahun lalu. Area yang mencakup tujuh desa di Kecamatan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan itu sudah didiami sekitar 16.000 penduduk, berikut 1.000 hektar lebih untuk kebun sawit, karet, dan kebun.

Usulan perubahan status lahan taman nasional itu tergantung kepada Menteri Kehutanan dan DPR. Menhut belum bersikap. DPR menunggu Menhut. "Berlarnya proses ini membuat masyarakat merasa kawasannya disetujui menjadi enclave," ujar Erli Sukrismanto, Kepala Balai Taman Nasional Kutai, Minggu (17/3), di Sangatta.

Warga merasa berhak tinggal dalam taman nasional dan berkebun, bahkan ingin memiliki sertifikat tanah, sebab merasa orangtua atau leluhurnya sudah di tempat itu sejak sebelum penetapan taman nasional. Murdoko, Kepala Desa Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan, mengatakan, warga menetap di kawasan itu sejak 50 tahun lalu.

"Kami berhak hidup dan mendapat penghidupan di tempat ini. Karena itu, warga menginginkan enclave. Itu juga akan mencegah perambahan dari luar. Jika ada enclave, ada kerja sama Taman Nasional Kutai dengan pihak kecamatan dan desa," papar Murdoko. Saat ini terdapat 1.935 warga Sangkima di kawasan Taman Nasional Kutai.

Kalau enclave disetujui pemerintah pusat, berarti warga bisa mendapatkan sertifikat tanah. Inilah yang dicemaskan pimpinan taman nasional. (pra)